

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, dan dijadikan acuan dalam penelitian ini dituangkan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1 Beberapa penelitian sebelumnya

No	Judul	Deskripsi
1	Perencanaan Strategi Sistem Informasi Berbasis TOGAF ADM Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta (oleh Gandhi & Kurniati tahun 2012 Fakultas Informatika, Institut Teknologi Telkom)	Penelitian tersebut membahas tentang penggunaan TOGAF ADM yang mengacu pada peraturan hokum yang berlaku, visi, misi dan aktivitas bisnis yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. Penelitian tersebut adalah berupa rancangan implementasi sistem informasi Disparbud kota Yogyakarta yang disusun secara berjangka sehingga pelaksanaan fungsi Disparbud dapat dioptimalkan.
2	Perencanaan Strategis Sistem Dan Teknologi Informasi Pada St. Ignatius Education Center Palembang (Sensuse & Sopryadi,2008 Universitas Indonesia)	Penelitian tersebut membahas tentang bentuk perencanaa strategi sistem informasi menggunakan metodologi Ward and Peppard, dengan masukan berupa analisis lingkungan bisnis internal, analisis lingkungan bisnis eksternal, analisis lingkungan SI/TI internal, analisis lingkungan SI/TI eksternal.Hasil dari penelitian tersebut mendefinisikan perencanaan strategis sistem informasi berupa strategi manajemen SI/TI, penerapan dan pemilihan teknologi informasi yang selaras dengan strategi bisnis St.Ignatius Education Center.

Tabel 2.1 sambungan

No	Judul	Deskripsi
3	Perencanaan Strategis Sistem Informasi Pada Disperindagkop Menggunakan The Open Group Architecture Framework (TOGAF) (oleh Robert Budiman, Augie David Manuputty tahun 2016 Universitas Kristen Satya Wacana)	Penelitian tersebut membahas tentang penggunaan TOGAF ADM yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja proses bisnis. Metode yang digunakan untuk perencanaan strategis sistem informasi pada Disperindagkop Kota Salatiga adalah The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Architecture Development Method (ADM).TOGAF ADM berisi tahapantahapan untuk merancang sebuah Enterprise Architecture (EA) bagi sebuah organisasi. Hasil yang diperoleh yaitu sebuah Enterprise Architecture (EA) yang dapat menjadi panduan pengelolaan SI/TI pada Disperindagkop Kota Salatiga.

Berdasarkan ketiga penelitian di atas, maka yang menjadi keunikan dari penelitian ini terletak pada gaya penerapan metodologi, kasus dan hasil penelitian yang berbeda. Metodologi yang digunakan adalah TOGAF ADM yang menyediakan tahapan proses dalam pengembangan arsitektur *enterprise* yang berbasis pada infrastruktur TI. Hasil dari penelitian ini akan menghasilkan sebuah *blueprint* EA yang dapat digunakan oleh Pemda Kabupaten Pringsewu dalam membangun suatu arsitektur SI/TI.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Perencanaan Strategis Sistem Informasi/Teknologi Informasi

Perencanaan strategis sistem informasi merupakan tahapan atau proses dalam menyusun strategi terhadap pengadaan dan pemanfaatan sistem informasi pada organisasi. Strategi SI/TI meliputi dua (2) strategi yaitu strategi SI menekankan pada penentuan aplikasi sistem informasi yang dibutuhkan oleh

organisasi. Esensi dari strategi SI adalah menjawab pertanyaan “apa?”. Sedangkan strategi TI lebih menekankan pada pemilihan teknologi, infrastruktur dan keahlian khusus yang terkait atau guna menjawab pertanyaan “bagaimana?” (Ward dan Peppard, 2002).

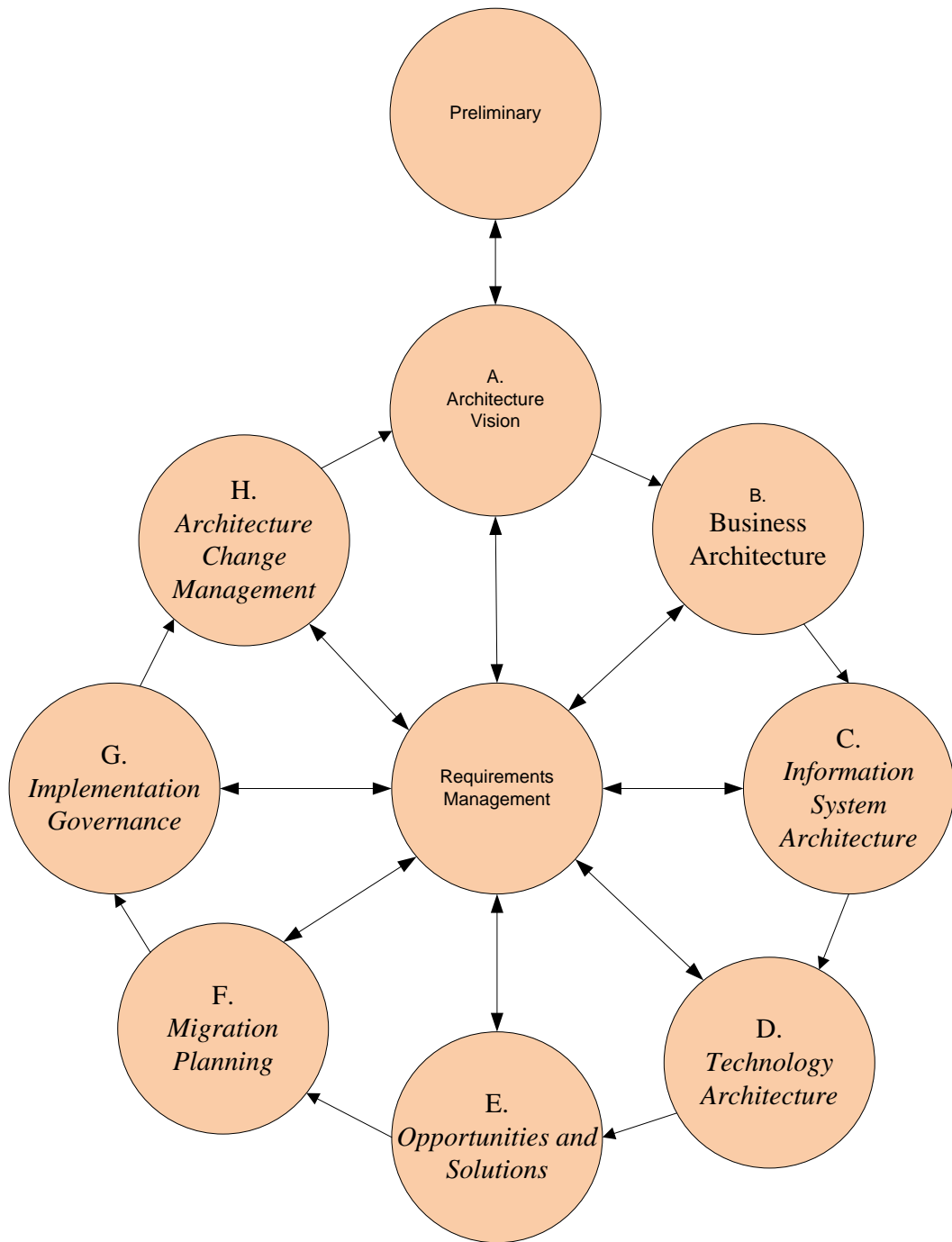
2.2.2. Enterprise Architecture (EA)

Enterprise Architecture (EA) merupakan sebuah blueprint atau cetak biru yang konseptual untuk mendefinisikan struktur dan operasi dari organisasi, dimana enterprise architecture bermaksud untuk menentukan bagaimana suatu organisasi dapat berjalan efektif dalam mencapai tujuan saat ini dan masa mendatang. Dalam artian terpisah, enterprise didefinisikan sebagai kumpulan dari organisasi yang memiliki serangkaian tujuan yang sama. Sedangkan architecture dalam konteks ini diartikan sebagai struktur dari komponen-komponen, hubungan antar komponen, dan prinsip-prinsip dan pedoman yang mengatur perancangan dan perubahan dari waktu ke waktu (*The Open Group*, 2009).

Makna Enterprise Architecture dideskripsikan sebagai key element yang membentuk organisasi dimana dimaksudkan untuk tercapainya keselarasan antar proses dan tujuan bisnis (Putra & Syukur, 2013). Dalam perancangan EA, dibutuhkan suatu framework agar pemodelan dapat terstruktur dan tepat. Terdapat beberapa jenis framework yang biasa digunakan dalam pemodelan EA, diantaranya yaitu *Zachman framework*, *TOGAF (The Open Group Architecture Framework)*, *FEAF (Federal Enterprise Architecture Framework)*, *TEAF (Treasury Enterprise Architecture Framework)*, dan lainnya (Yunis & Theodora, 2013)

2.2.3. The Open Group Architecture Framework

The Open Group Architecture Framework (TOGAF) memberikan metode yang detail bagaimana membangun dan mengelola serta mengimplementasikan EA dan SI yang disebut dengan *Architecture Development Method* (ADM) (*The Open Group*, 2009). Elemen kunci dari TOGAF adalah ADM yang memberikan gambaran spesifik untuk proses pengembangan EA (Lise, 2006). ADM adalah fitur penting yang memungkinkan perusahaan mendefinisikan kebutuhan bisnis dan membangun arsitektur spesifik untuk memenuhi kebutuhan itu. ADM terdiri dari tahapan-tahapan yang dibutuhkan dalam membangun EA, tahapan-tahapan ADM ditunjukkan pada Gambar 2.1, juga merupakan metode yang *fleksibel* yang dapat mengantifikasi berbagai macam teknik pemodelan yang digunakan dalam perancangan, karena metode ini bisa disesuaikan dengan perubahan dan kebutuhan selama perancangan dilakukan.



Gambar 2.1. *ADM Cycle* (The Open Group, 2009)

Gambar 2.1 juga menyatakan visi dan prinsip yang jelas tentang bagaimana melakukan pengembangan EA, prinsip tersebut digunakan sebagai ukuran dalam menilai keberhasilan dari pengembangan EA oleh

organisasi (*The Open Group*, 2009), prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip Enterprise

Pengembangan arsitektur yang dilakukan diharapkan mendukung seluruh bagian organisasi, termasuk unit-unit organisasi yang membutuhkan.

2. Prinsip Teknologi Informasi (TI)

Lebih mengarahkan konsistensi penggunaan TI pada seluruh bagian organisasi, termasuk unit-unit organisasi yang akan menggunakan.

3. Prinsip Arsitektur

Merancang arsitektur sistem berdasarkan kebutuhan proses bisnis dan bagaimana mengimplementasikannya.

Langkah awal yang perlu diperhatikan pada saat mengimplementasikan TOGAF ADM adalah mendefinisikan persiapan-persiapan yaitu dengan cara mengidentifikasi konteks arsitektur yang akan dikembangkan, kedua adalah mendefinisikan strategi dari arsitektur dan menetapkan bagian-bagian arsitektur yang akan dirancang, yaitu mulai dari arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, arsitektur teknologi, serta menetapkan kemampuan dari arsitektur yang akan dirancang dan dikembangkan (Harrison dan Varveris, 2006).

Tahapan dari TOGAF ADM secara ringkas bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan (*Preliminary Phase*): Konfirmasi kerangka pendukung dan mengidentifikasi prinsip arsitektur.
2. Phase A: *Architecture Vision*. Mendefinisikan scope, visi organisasi dan menetapkan strategi keseluruhan.

3. Phase B: *Business Architecture*. Mendeskripsikan bisnis arsitektur saat ini, menghindari dampak penyimpangan arsitektur.
4. Phase C: *Information System Architecture*. Mengembangkan arsitektur untuk data dan aplikasi.
5. Phase D: *Technology Architecture*. Menciptakan keseluruhan infrastruktur yang akan digunakan.
6. Phase E: *Opportunities and Solutions*. Mengembangkan strategi keseluruhan, mencari solusi untuk perancangan pada phase sebelumnya.
7. Phase F: *Migration Planning*. Merencanakan persiapan migrasi kepada perancangan yang telah dibuat.
8. Phase G: *Implementation Governance*. Melakukan implementasi terhadap perancangan dan penerapan yang sudah ada.
9. Phase H: *Architecture Change Management*. Memonitor sistem yang sedang berjalan untuk kepentingan perubahan dan menentukan apakah untuk mengawali satu siklus baru perlu pengulangan kembali ke tahap persiapan.

2.2.4. Perbandingan Metode Arsitektur Enterprise

Untuk memilih sebuah framework arsitektur teknologi informasi terdapat kriteria yang berbeda yang bisa dijadikan sebagai acuan yaitu (Setiawan, 2009):

1. Tujuan dari arsitektur perusahaan dengan melihat bagaimana definisi arsitektur dan pemahamannya, proses arsitektur yang telah ditentukan sehingga mudah untuk diikuti, serta dukungan terhadap evolusi arsitektur.

2. Input untuk aktivitas arsitektur perusahaan seperti pendorong bisnis dan input teknologi.
3. Output dari aktivitas arsitektur perusahaan seperti model bisnis dan desain transisional untuk evolusi dan perubahan.
4. Framework merupakan sebuah bagian penting dalam pendesainan arsitektur enterprise yang seharusnya memiliki kriteria:

a) *Reasoned.*

Framework yang masuk akal yang dapat memungkinkan pembuatan arsitektur yang bersifat menentukan ketika terjadi perubahan batasan dan tetap menjaga integritasnya walaupun menghadapi perubahan bisnis dan teknologi serta permintaan yang tak terduga.

b) *Cohesive.*

Framework yang berhubungan memiliki sekumpulan perilaku yang akan seimbang dalam cara pandang dan ruang lingkungannya.

c) *Adaptable framework*

Haruslah bisa beradaptasi terhadap perubahan yang mungkin sangat sering terjadi dalam organisasi.

d) *Vendor-independent.*

Framework haruslah tidak tergantung pada vendor tertentu untuk benar-benar memaksimalkan benefit bagi organisasi.

e) *Technology-independent.*

Framework haruslah tidak tergantung pada teknologi yang ada saat ini, tapi dapat menyesuaikan dengan teknologi baru.

f) *Domain-neutral*.

Atribut penting bagi framework agar memiliki peranan dalam pemeliharaan tujuan organisasi.

g) *Scalable*.

Framework haruslah beroperasi secara efektif pada level departemen, unit bisnis, pemerintah dan level korporat tanpa kehilangan fokus dan kemampuan untuk dapat diaplikasikan.

Metode kerangka kerja pada arsitektur enterprise bukan hanya TOGAF saja, melainkan terdapat metode kerangka kerja arsitektur enterprise lainnya seperti Zachman Framework dan FEAF (Federal Enterprise Architecture Framework). Adapun perbedaan pada Zachman Framework, FEAF dan TOGAF terdapat pada tabel 2.2 Perbandingan Metode Arsitektur Enterprise, yakni sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perbandingan Metode Arsitektur *Enterprise* (Setiawan, 2009)

	Zachman	FEAF	TOGAF
Definisi arsitektur dan pemahamannya	Parsial	Ya	Ya pada fase <i>preliminary</i>
Proses Arsitektur yang detail	Ya	Tidak	Ya ADM dengan 9 fase yang detail
Support terhadap evolusi arsitektur	Tidak	Ya	Ya ada fase <i>Migration planning</i>
Standarisasi	Tidak	Tidak	Ya menyediakan TRM, <i>standards information</i>
<i>Architecture Knowledge Base</i>	Tidak	Ya	Ya
Pendorong bisnis	Parsial	Ya	Ya

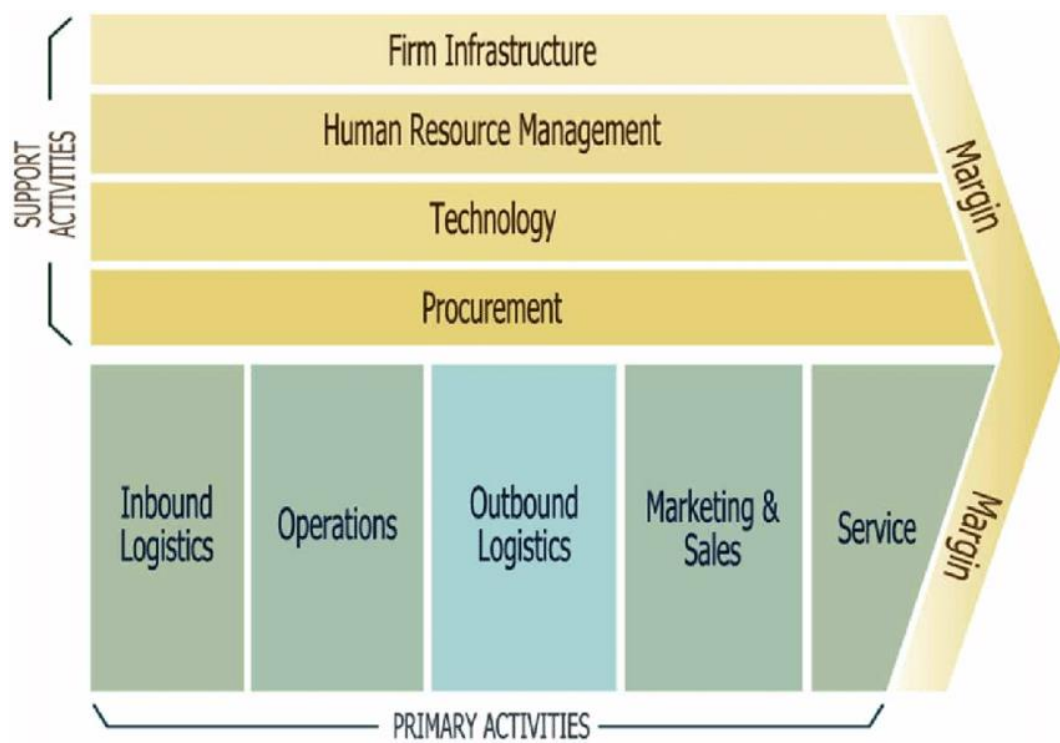
Input Teknologi	Tidak	Ya	Ya
Model bisnis	Ya	Ya	Ya
Desain transisional	Tidak	Ya	Ya hasil fase <i>Migration planning</i>
Neutrality	Ya	Tidak	Ya
Menyediakan prinsip arsitektur	Tidak	Tidak hanya untuk karakteristik FEAF	Ya

Berdasarkan perbandingan ketiga kerangka kerja arsitektur *enterprise* (Zachman, FEAF dan TOGAF) pada tabel 2.1. Terlihat bahwa TOGAF adalah suatu metode arsitektur *enterprise* yang lengkap sehingga mampu mengakomodir kebutuhan komponen sistem informasi akademik. Untuk membangun sistem informasi akademik diperlukan arsitektur *enterprise* yang memiliki proses arsitektur yang detail, mempunyai *architecture knowledge base* (basis pengetahuan arsitektur) dan adanya prinsip arsitektur. Proses arsitektur yang detail, *architecture knowledge base* dan prinsip arsitektur, semuanya terdapat pada TOGAF ADM.

2.2.5. Value Chain

Analisa rantai nilai (*Value Chain*) pertama kali diusulkan oleh Michael Porter pada tahun 1985 yang mencatat bahwa “setiap perusahaan adalah kumpulan kegiatan yang dilakukan untuk merancang, memproduksi, memasarkan, memberikan dan mendukung produk atau layanan. Semua kegiatan tersebut dapat direpresentasikan dengan menggunakan rantai nilai. Nilai rantai hanya dapat dipahami dalam konteks unit bisnis” (Ward & Peppard, 2002). *Value chain* merupakan teknik atau metode untuk mendapatkan serta untuk mengembangkan

cara perusahaan menjalankan kegiatannya. Dan juga digunakan untuk memisahkan kegiatan apa yang dilakukan dan bagaimana perusahaan melakukannya.



Gambar 2.1. Value Chain Sumber: (https://en.wikipedia.org/wiki/Value_chain)

Analisa rantai nilai mengidentifikasi dan menginventarisasikan area-area fungsi bisnis, yaitu dengan pengelompokkan area-area fungsional ke dalam 2 aktivitas, yaitu :

1. Aktivitas-aktivitas utama {primary activities), yang berupa :
 - a. Logistik masukan (*inbound logistics*) : aktivitas yang berhubungan dengan penerimaan, penyimpanan dan menyebarkan masukan.
 - b. Operasi (*operations*) : aktivitas yang mentransformasikan masukan menjadi keluaran menjadi produk akhir.

- c. Logistik keluaran (*outbound logistics*) : aktivitas yang berhubungan dengan menyebarkan produk/jasa ke pelanggan.
 - d. Pemasaran dan penjualan (*marketing and sales*) : aktivitas yang berhubungan dengan pemasaran dan penjualan seperti promosi dan sebagainya.
 - e. Layanan (*service*) : aktivitas yang berhubungan dengan penyedia layanan untuk meningkatkan pemeliharaan produk seperti pelatihan, perbaikan dan perawatan.
2. Aktivitas-aktivitas pendukung (*support activities*), yang berupa :
- a. Infrastruktur perusahaan (*firm infrastructure*) : aktivitas yang terkait dengan biaya serta aset yang berhubungan dengan manajemen umum, akuntansi dan keuangan, keamanan dan keselamatan sistem informasi dan fungsi lainnya.
 - b. Manajemen sumber daya manusia (*human resources management*) : aktivitas yang terkait dengan penerimaan, pelatihan, pengembangan dan kompensasi untuk semua tipe personil dan mengembangkan tingkat keahlian pekerja.
 - c. Pengembangan teknologi (*technology development*) : aktivitas yang terkait dengan biaya yang berhubungan dengan produk, perbaikan proses, perancangan peralatan, pengembangan perangkat lunak komputer, sistem telekomunikasi, kapabilitas basis data baru dan pengembangan dukungan sistem berbasis komputer.

- d. Pengadaan (*procurement*) : aktivitas yang terkait dengan bagaimana sumber daya diperoleh .seperti fungsi pembelian input yang digunakan dalam organisasi rantai nilai.

2.3. Kerangka Teoritis Penelitian

Kerangka penelitian ini penulis buat karena adanya tuntutan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) menurut Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Penerapan *e-Government* ini khususnya dilakukan untuk mendukung *good governance* pada Pemerintah Daerah Pringsewu sebagai studi kasus tempat penulis melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1). INPRES No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*
- 2). Proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) pada Pemerintah Daerah Pringsewu
- 3). Perumusan kerangka dan prinsip penerapan SI/TI pada Pemerintah Daerah Pringsewu menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM
- 4). Rancangan arsitektur SI/TI pada Pemerintah Daerah Pringsewu

Seperti pada penjelasan di atas, selanjutnya dilakukan perumusan prinsip penerapan SI/TI menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM dalam pengembangan arsitektur SI/TI, yang kemudian menghasilkan rancangan arsitektur SI/TI yang dapat diterapkan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah Pringsewu.

2.4. Gambaran Umum Pemerintah Daerah Pringsewu

2.4.1. Sejarah Pemerintah Daerah Pringsewu

Sejarah Pringsewu diawali dengan berdirinya sebuah perkampungan (tiyuh) bernama Margakaya pada tahun 1738, yang dihuni masyarakat asli Lampung-Pubian yang berada di tepi aliran sungai Way Tebu (4 km dari pusat kota Pringsewu ke arah selatan saat ini). Kemudian 187 tahun berikutnya, tepatnya pada tanggal 9 November 1925, berdiri Desa Pringsewu, yang sebelumnya didahului dengan adanya sekelompok masyarakat dari Pulau Jawa serta sebagian berasal dari para kolonis Desa Bagelen, Gedongtataan, melalui program kolonisasi oleh pemerintah Hindia Belanda, yang membuka areal permukiman baru dengan memabat hutan bambu yang cukup lebat di sekitar tiyuh Margakaya tersebut. Karena begitu banyaknya pohon bambu di hutan yang mereka buka tersebut, oleh masyarakat desa yang baru dibuka tersebut itulah kemudian dinamakan Pringsewu, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya Bambu Seribu atau bermakna wilayah yang banyak terdapat pohon bambu.

Selanjutnya, pada tahun 1936 berdiri pemerintahan Kawedanaan Tataan yang berkedudukan di Pendopo Pringsewu, dengan wedana pertama yakni Bapak Ibrahim hingga 1943. Selanjutnya Kawedanaan Tataan berturut-turut dipimpin oleh Bapak Ramelan pada tahun 1943, Bapak Nurdin pada tahun 1949, Bapak Hasyim Asmarantaka pada tahun 1951, Bapak Saleh Adenan pada tahun 1957, serta pada tahun 1959 diangkat sebagai Wedana yaitu Bapak R.Arifin Kartaprawira yang merupakan Wedana terakhir hingga tahun 1964, saat pemerintahan Kawedanaan Tataan dihapuskan. Pada tahun 1964, dibentuk

pemerintahan Kecamatan Pringsewu yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964, yang sebelumnya Pringsewu juga pernah menjadi bagian dari Kecamatan Pagelaran yang juga berkedudukan di Pringsewu.

Dalam sejarah perjalanan berikutnya, Kecamatan Pringsewu bersama sejumlah kecamatan lainnya di wilayah Lampung Selatan bagian barat yang menjadi bagian wilayah administrasi Pembantu Bupati Lampung Selatan Wilayah Kota Agung, masuk menjadi bagian wilayah Kabupaten Dati II Tanggamus berdasarkan Undang-undang No.2 Tahun 1997, hingga terbentuk sebagai daerah otonom yang mandiri bernama Kabupaten Pringsewu, melalui Undang-undang No.48 tahun 2008, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Hi.Mardiyanto pada tanggal 3 April 2009 di Gedung Sasana Bhakti Praja Departemen Dalam Negeri di Jakarta, sekaligus pelantikan Penjabat Bupati Pringsewu pertama Bapak Ir.Hi.Masdulhaq. Kabupaten Pringsewu merupakan wilayah heterogen terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, dengan masyarakat Jawa yang cukup dominan, disamping masyarakat asli Lampung, yang terdiri dari masyarakat yang beradat Pepadun (Pubian) serta masyarakat beradat Saibatin (Pesisir).

Kabupaten Pringsewu mempunyai luas wilayah 625 km², berpenduduk 475.353 jiwa, terdiri dari 126 pekon (desa) dan 5 kelurahan, yang tersebar di 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Pringsewu, Pagelaran, Pardasuka, Gadingrejo, Sukoharjo, Ambarawa, Adiluwih, Kecamatan Banyumas dan Pagelaran Utara. Dari segi luas wilayah, Kabupaten Pringsewu saat ini merupakan kabupaten terkecil, sekaligus terpadat di Provinsi Lampung.

Secara geografis Kabupaten Pringsewu terletak di antara 104°45'25"–105°08'42" BT dan 5°08'10"-5°34'27" LS. Batas wilayah Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara Kecamatan Sendang Agung dan Kecamatan Kalirejo (Kabupaten Lampung Tengah)
2. Sebelah Selatan Kecamatan Bulok dan Kecamatan Cukuh Balak (Kabupaten Tanggamus)
3. Sebelah Barat Kecamatan Pugung dan Kecamatan Air Naningan (Kabupaten Tanggamus)
4. Sebelah Timur Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Gedongtataan, Kecamatan Waylima dan Kecamatan Kedondong (Kabupaten Pesawaran)

Sejak berdiri sampai saat ini, Kabupaten Pringsewu telah di pimpin oleh bupati dan wakil bupati yang dapat di lihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Bupati Dan Wakil Bupati

No	Bupati	Mulai jabatan	Akhir jabatan	Wakil
-	Ir. H. Masdulhaq Pjs. Bupati	3 April 2009	24 Oktober 2009	-
-	Ir. H. Helmi Machmud Pjs. Bupati	24 Oktober 2009	31 Agustus 2010	-
-	H. Sudarno Eddi, SH., MH. Pjs. Bupati	31 Agustus 2010	23 November 2011	-
1	H. Sujadi Saddat	23 November 2011	23 November 2016	Hi. Handitya Narapati SZP, SH.
-	Drs. Yuda Setiawan, M.M. Pjs. Bupati	23 November 2016	22 Mei 2017	-
2	H. Sujadi Saddat	22 Mei 2017	<i>Petahana</i>	Dr. H. Fauzi, S.E., M.Kom., AKT

2.4.2. Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Pringsewu

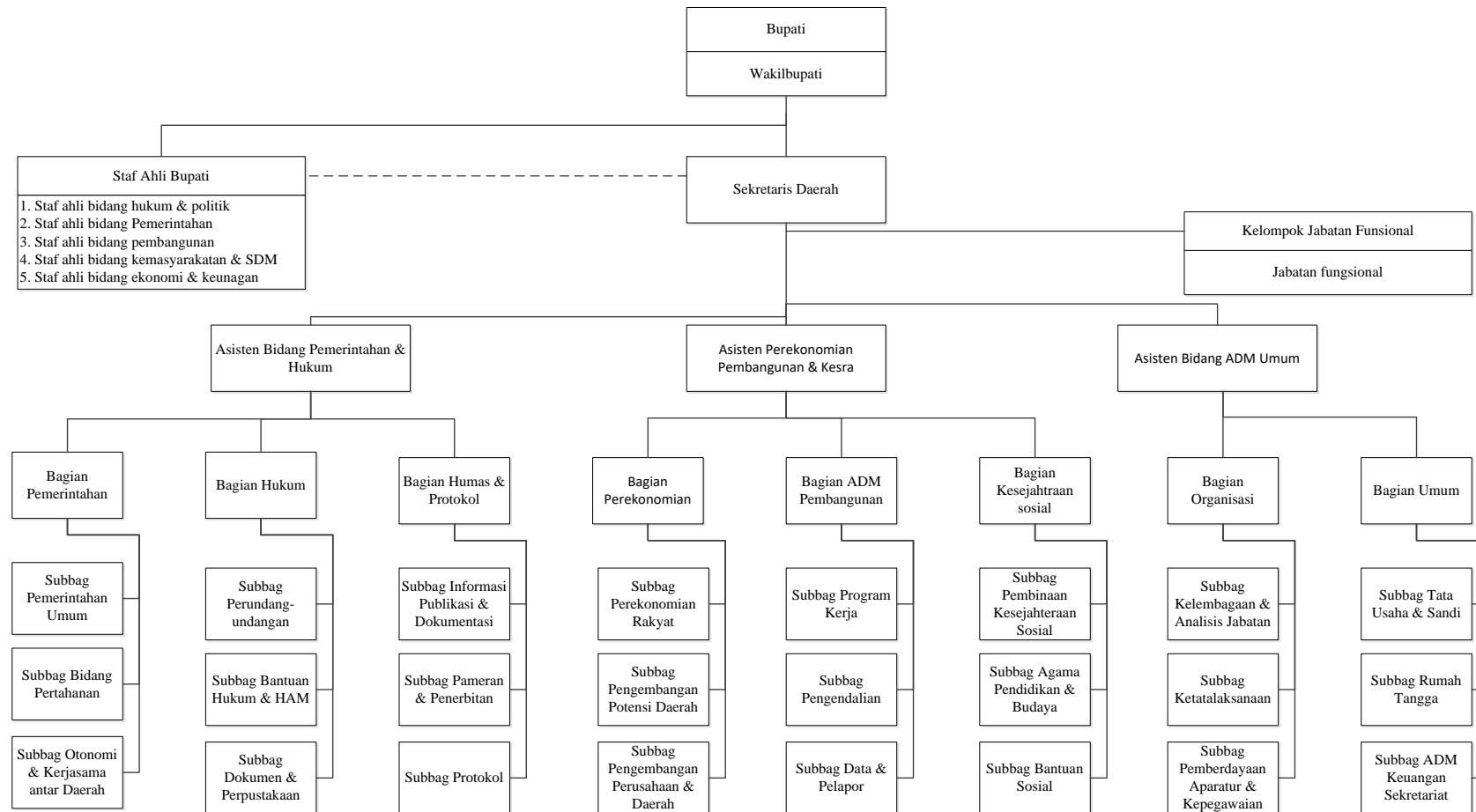
1. Visi Pemerintahan Daerah Pringsewu :

Visi merupakan gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang. Visi memperlihatkan gambaran keseluruhan terhadap kondisi yang akan dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan kreativitas dalam pelaksanaannya. Selanjutnya dengan mempertimbangkan capaian pembangunan selama lima tahun terakhir dan tantangan pembangunan yang dihadapi, maka visi pembangunan daerah tahun 2017-2022 .

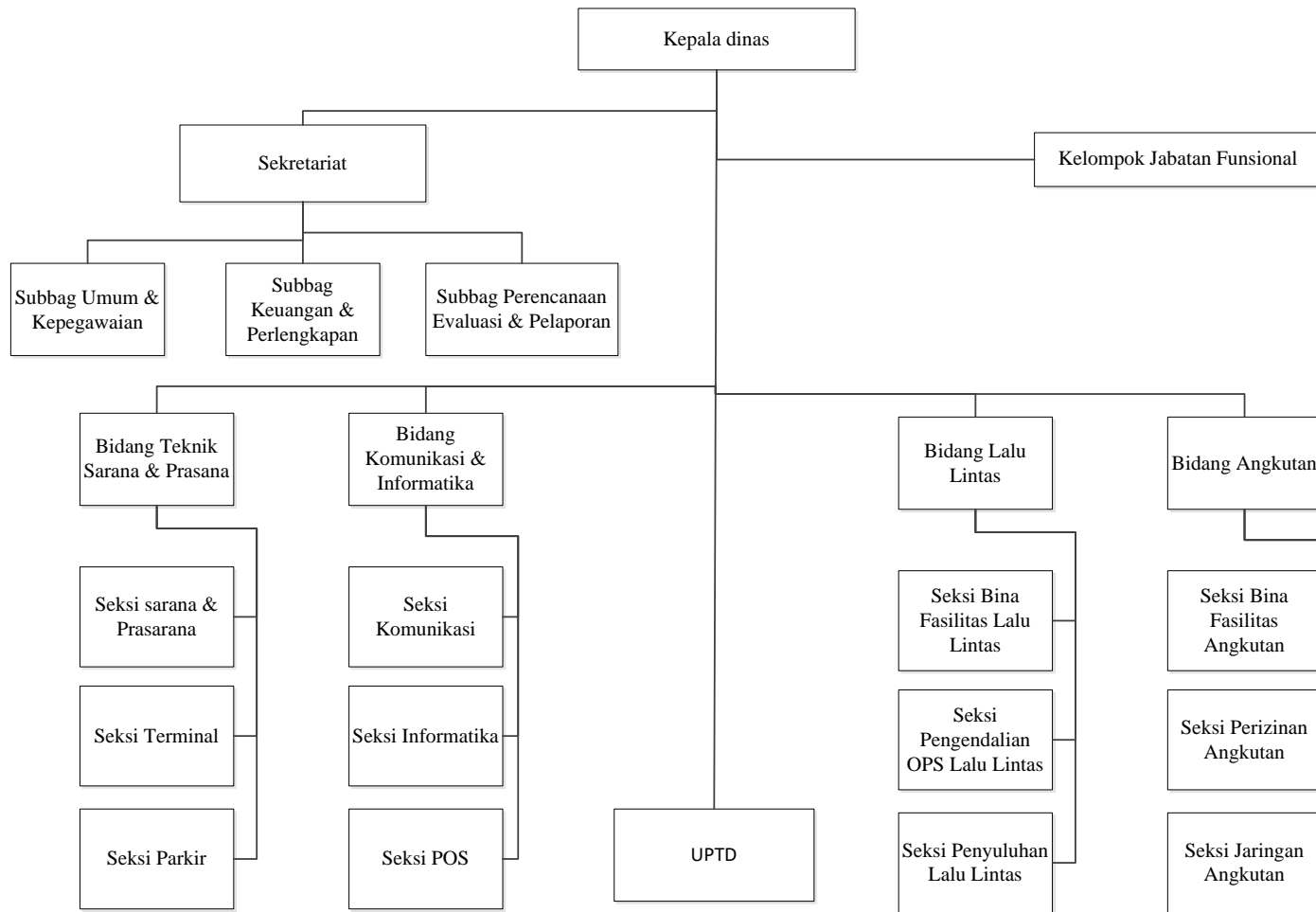
2. Misi Pemerintahan Daerah Pringsewu :

- a. Peningkatan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar masyarakat secara merata.
- b. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
- c. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing dan berwawasan gender.
- d. Mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan secara berkualitas dan berwawasan lingkungan.
- e. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang profesional dan bersih dalam situasi yang kondusif.

2.4.3. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Pringsewu



Gambar 2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah Pringsewu



Gambar 2.3. Struktur Organisasi Diskominfo & Dishub

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi memiliki peranan penting di dalam perencanaan arsitektur enterprise di Pemerintahan Daerah Pringsew. Untuk itu diperlukan peranan dan tanggungjawab pihak yang terkait khususnya pada struktur organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi seperti pada gambar tersebut. Dari gambar di atas terlihat bahwa ada 2 seksi atau sub bidang yang bertugas di bidang teknologi informasi yaitu bidang komunikasi dan informatika, yang di dalamnya terdiri dari :

1. Seksi komunikasi
2. Seksi Informatika